BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan teknologi dan ekonomi, di setiap negara pasti membutuhkan pemerintahan yang baik atau yang sering disebut *Good Governance*. Pemerintahan yang baik ini merupakan suatu bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan.Untuk pencapaian tujuan tersebut setiap pemerintahan harus dapat mengelola sumber daya yang ada di negara, salah satunya yang terpenting adalah keuangan. Peran serta masyarakat dalam pemerintahan sangat besar. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Dari kutipan Mulyadi tahun 2002 hal 11 Masyarakat dapat menjadi investor di setiap mesin perekonomian negara. Agar mesin perekonomian suatu negara dapat menyalurkan dana masyarakat ke dalam usaha-usaha produktif yang beroperasi secara efisien, maka pada setiap mesin perekonomian perlu disediakan informasi keuangan yang handal, yang memungkinkan para investor memutuskan ke usaha-usaha apa dana mereka di investasikan.

Dalam kutipan Artjana tahun 2004, *Good governance* menghendaki pemerintahan dijalankan dengan mengikuti prinsip-prinsip pengelolaan yang baik, seperti *Transparancy* (keterbukaan), *Accountability* (akuntabilitas), *Responsibility* (tanggung jawab), *Independency* (kemandirian), dan *Fairness* (kejujuran),

sehingga sumber daya negara yang berada dalam pengelolaan pemerintah benar-benar mencapai tujuan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat dan negara. Penerapan prinsip-prinsip *good governance* dalam penyelenggaraan negara tidak lepas dari masalah akuntabilitas dan tranparansi dalam pengelolaan keuangan negara, karena aspek keuangan negara menduduki posisi strategis dalam proses pembangunan bangsa, baik dari segi sifat, jumlah maupun pengaruhnya terhadap kemajuan, ketahanan, dan kestabilan perekonomian bangsa.

Nasution tahun 2009, dalam rangka mewujudkan *good governance* baik dalam proses pengelolaan keuangan, penyajian laporan keuangan serta akuntabilitas keuangan pemerintah, telah dilakukan beberapa upaya-upaya yang diantaranya: pada kurun waktu tahun 1999 sampai dengan 2005 telah dikeluarkan paket undang-undang pengelolaan keuangan negara yang meliputi yaitu Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan negara dan UU No. 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. Ketiga paket UU ini merupakan produk legislasi sebagai wujud dari kehendak untuk melaksanakan reformasi di bidang keuangan negara sekaligus menuntut suatu perubahan mendasar (*change*) di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara.

Dengan adanya laporan keuangan baik keuangan pusat maupun daerah diharapkan dapat dikelola dengan baik dalam rangka mengelola dana publik secara transparan, ekonomis, efisien, efektif dan akuntabel. Adanya laporan

keuangan tersebut perlu dipertimbangkan lebih lanjut kegunaan laporan sebagai suatu kewajiban belaka tanpa menjadikan keuangan itu sebagai sumber informasi untuk menentukan dan mengambil kebijakan dalam mengembangkan dan menumbuhkan wilayahnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 mewajibkan laporan keuangan direviu oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebelum diserahkan kepada BPK untuk diaudit. Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tersebut dilakukan oleh Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota. Laporan keuangan yang disajikan oleh Kepala Daerah sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran merupakan tanggung jawab Kepala Daerah yang bersangkutan. Untuk itu kepala daerah harus membuat pernyataan tertulis bahwa laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai dan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dalam pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006, dinyatakan bahwa reviu atas laporan keuangan oleh APIP dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan didalam laporan keuangan tersebut. Reviu dimaksudkan untuk memberikan keyakinan akurasi, keandalan, dan keabsahan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan sebelum disampaikan oleh pejabat pengelola keuangan kepada Kepala Daerah sebelum Kepala Daerah menandatangani surat pernyataan tanggung jawab atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan kemudian menyampaikannya LKPD tersebut kepada BPK RI sebagai eksternal auditor pemerintah untuk diperiksa dan diberikan opini.

Menurut Artjana (2004) reformasi menuntut profesionalitas pengelolaan keuangan negara yang akan mendorong akuntabilitas dan transparansi mengingat adanya suatu keharusan untuk hal-hal sebagai berikut :

a. Laporan keuangan pemerintah dihasilkan melalui proses akuntansi
b. Laporan keuangan pemerintah disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan pemerintahan, yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, dan Laporan Arus Kas disertai dengan Catatan Atas Laporan Keuangan
c. Laporan keuangan disajikan sebagai wujud pertanggungjawaban setiap entitas. Laporan ini meliputi laporan keuangan pemerintah pusat, laporan keuangan kementerian negara/lembaga, dan laporan keuangan pemerintah daerah
d. Laporan keuangan pemerintah pusat/daerah disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)/ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selambat-lambatnya enam bulan setelah tahun anggaran yang bersangkutan berakhir
e. Laporan keuangan pemerintah diaudit oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen dan profesional sebelum disampaikan kepada DPR/DPRD. Untuk maksud tersebut Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) selaku eksternal auditor dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) selaku internal auditor perlu meningkatkan kerjasama dan meningkatkan profesionalisme di bidang standar pemeriksaan pemerintah.

Data hasil pemeriksaan BPK RI semester II tahun 2009 atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) disajikan dalam tiga kategori yaitu opini, sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan. Saat ini perkembangan kualitas laporan keuangan serta akuntabilitas atas LKPD belum sebagaimana yang diharapkan. Hal ini terlihat dari opini atas LKPD yang diberikan oleh BPK RI masih ada yang mendapatkan opini *disclaimer* atau tidak memberikan pendapat. Berikut ini perkembangan opini LKPD tahun 2006 – 2008

Tabel 1.1
Perkembangan Opini LKPD tahun 2006 – 2008

LKPD	OPINI								JUMLAH
	WTP	%	WDP	%	TW	%	TMP	%	
Tahun 2006	3	1	327	70	28	6	105	23	463
Tahun 2007	4	1	283	60	59	13	122	26	468
Tahun 2008	12	3	324	67	31	6	115	24	482

Sumber: IHPS BPK RI semester II tahun 2009

Hasil evaluasi atas SPI yang dilakukan oleh BPK RI menunjukkan kasus-kasus kelemahan yang dikelompokkan sebagai berikut:

1. Kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan
2. Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja
3. Kelemahan struktur pengendalian intern.

Mutasi tambah Aset Tetap yang disajikan pada Neraca berbeda dengan realisasi Belanja Modal yang disajikan pada Tabel 1.2 Laporan Realisasi Anggaran (LRA), yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.2
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

No.	U R A I A N	JUMLAH (Rp)
1.	**TAN AH**	15.616.102.772.238,0 0 235.542.000.000,00
	Neraca:	15.380.560.772.238,0 0
	Saldo awal 2007	15.412.408.510.466,0
	Koreksi saldo awal	0 31.847.738.228,00
	Saldo awal setelah koreksi	
	LRA:	31.615.884.588,00
	Selisih	**231.853.640,00**
2.	**PERALATAN & MESIN Neraca:**	214.259.364.612,00 276.071.729.090,00
	Saldo awal 2007	61.812.364.478,00
	Saldo akhir 2007	
	Mutasi tambah.....	
	LRA :	63.163.588.574,00
3.	**GEDUNG & BANGUNAN Neraca:**	1.170.269.486.849,0 0
	Saldo awal 2007	1.239.096.051.973,0
	Saldo akhir 2007	0 68.826.565.124,00
	Mutasi tambah.....	
	LRA :	67.045.233.470,00
	Selisih	**1.781.331.654,00**
4.	**JALAN, IRIGASI & JARINGAN Neraca:**	1.158.492.986.071,0 0 1.213.387.363.739,0
	Saldo awal 2007	0 54.894.377.668,00
	Saldo akhir 2007	
	LRA :	64.918.843.568,00
5.	**ASET TETAP LAINNYA Neraca:**	13.155.845.306,00 17.476.749.353,00
	Saldo awal 2007	4.320.904.047,00
	Saldo akhir 2007	
	Mutasi tambah.....	
	LRA :	5.206.332.050,00

Sumber:LHP BPK 2009

Atas selisih tersebut, Bagian Aset Setda Kota Bandung melakukan rekonsiliasi dengan setiap SKPD. Namun sampai dengan pemeriksan berakhir, hasil rekonsiliasi tersebut belum diterima oleh BPK RI.

Hal tersebut tidak sesuai dengan :

a. PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pasal 100 ayat (2) yang menyatakan bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah menyusun laporan keuangan pemerintah daerah terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Pada ayat (3) menyatakan bahwa, Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) pada angka 32 mengenai Karakteristik Kualitatif Laporan Keuangan menyatakan bahwa karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik berikut ini merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki: (1) Relevan; (2) Andal; (3) Dapat dibandingkan; (4) Dapat dipahami.
c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

    1) Pasal 265 ayat (1) menyatakan SKPD menyusun dan melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara periodik yang meliputi: (1) Laporan Realisasi Anggaran SKPD; (2) Neraca SKPD; (3) Catatan

atas Laporan Keuangan SKPD dan ayat (2) yang menyatakan laporan pertanggungjawaban APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disajikan sesuai dengan peraturan pemerintah yang mengatur tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

2) Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa Kuasa BUD bertugas memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk.

Hal tersebut mengakibatkan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Tahun 2007 yang belum disusun sesuai norma-norma dan prinsip akuntansi sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan belum sepenuhnya bisa diyakini kewajarannya.

Penulis mendapatkan fenomena yang bersumber dari BPK tahun 2005 yaitu Fenomena yang terjadi mengenai pelaporan keuangan daerah yaitu adanya pendapat dari Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Anwar Nasution, yang menilai kualitas laporan keuangan daerah semakin buruk. Indikasinya makin banyak laporan keuangan yang mendapat opini wajar dengan pengecualian dan tidak wajar. Untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan ini, BPK mengkampanyekan agar auditor membuat *management representative letter* yang memuat pernyataan auditor tentang tidak adanya kecurangan material dalam laporan keuangan. Daerah juga diminta membuat rencana aksi untuk membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti standar pemerintahan. Hal ini

dikarenakan minimnya tenaga ahli yang mengetahui mengenai pembukuan yang berada di daerah

Dari fenomena diatas dapat penulis simpulkan yaitu bahwa untuk meningkatkan kulitas laporan keuangan, pemerintah pusat maupun daerah harus membenahi sistem pembukuan keuangan mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan sehingga dapat tercapai kualitas laporan keuangan yang berkualitas.

Fenomena yang penulis dapatkan yaitu Kualitas Laporan Keuangan yang sangat kurang memenuhi kriteria karena tidak menyajikan sebagian informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama), menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, kemajuan pencapain target jangka menengah. Dan juga perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun dalam LAKIP belum dapat diandalkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan yang lain yang diperlukan dan informasi kinerja.

Dari sumber BPKP LHE 2009 Kualitas pengukuran kinerja pemerintah kota bandung sangat kurang memenuhi kriteria yaitu indikator kinerja sasaran belum dapat diukur secara obyektif, belum menggambarkan hasil, tidak relevan dengan sasaran yang akan diukur. Kualitas pengukuran kinerja pun belum cukup untuk mengukur sasarannya, target, kinerja jangka menengah. Dan kualitas pengukuran kinerja belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama). Informasi yang disajikan pun belum digunakan untuk peningkatan kinerja evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD yang sangat kurang memenuhi kriteria.

Dari paparan atau penjelasan diatas yaitu Kualitas pengukuran kinerja pemerintah kota bandung sangat kurang memenuhi kriteria yaitu indikator kinerja sasaran belum dapat diukur secara obyektif, belum menggambarkan hasil, tidak relevan dengan sasaran yang akan diukur, belum cukup untuk mengukur sasarannya, target, kinerja jangka menengah, belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama tidaka ada).

Laporan keuangan pemerintah daerah yang dihasilkan melalui proses akuntansi merupakan bentuk transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan publik. Untuk dapat menghasilkan laporan keuangan yang semakin baik (tantangan) dibutuhkan tenaga-tenaga akuntansi terampil pada pemerintah daerah, hal ini dapat dilakukan melaui kegiatan bimbingan teknis akuntansi bagi pegawai pemerintah daerah yang ditugaskan sebagai pengelola keuangan atau melalui rekrutmen pegawai baru yang memiliki kemampuan akuntansi keuangan daerah. Disamping tenaga-tenaga akuntansi terampil tersebut, juga dibutuhkan adanya sistem dan prosedur pembukuan yang memadai dan kebijakan akuntansi sebagai pedoman pegawai dalam mengelola keuangan daerah.

Akuntabilitas dan transparansi keuangan negara merupakan tujuan penting dari reformasi sektor publik mengingat secara *definitive* kualitas kepemerintahan yang baik ditentukan oleh kedua hal tersebut. Akuntabilitas keuangan negara adalah pemberian informasi dan pengungkapan (*disclosure*) atas aktivitas dan kinerja keuangan negara kepada semua pihak yang berkepentingan (*stakeholder*),

sehingga hak-hak publik, yaitu hak untuk mengetahui (*right to know*), hak untuk diberi informasi (*right to be kept informed*), dan hak untuk didengar aspirasinya (*right to be heard and to be listened to*), dapat dipenuhi. (Bahrullah, 2010)

Dari sumber BPKP LHE 2009 Fenomena yang penulis temukan yaitu Pemerintah kota Bandung hampir memenuhi semua kriteria yaitu telah terdapat pihak yang bertanggung jawab untuk pengumpulan kinerja, namun Sangat kurang memenuhi kriteria yaitu belum menetapkan indikator kinerja utama (IKU) baik pemerintah daerah maupun SKPDnya, sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor:PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapan indikator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, dan tidak terdapat pedoman pengumpulan data kinerja dan belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama tidak ada) dan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Dari pemaparan diatas penulis simpulkan bahwa tidak terdapat pedoman pengumpulan data kinerja belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indicator kinerja utama tidak ada) dan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Kepala sub bagian umum evaluasi dan pelaporan tahun 2011 mengatakan bahwa adanya fenomena khusus yang penulis temukan tentang akuntabilitas laporan keuangan yaitu Rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK RI tahun 2009 mengenai temuan, rekomendasi dan tindak lanjut di Provinsi Jawa Barat terlihat pada tabel 1.3 berikut ini

Tabel 1.3
Rekapitulasi Hasil Pemantauan Tindak Lanjut dari Hasil Pemeriksaan BPK RI atas Pemerintah Daerah, di Provinsi Jawa Barat

Provinsi	Periode	Temuan	Rekomendasi	Sesuai dengan rekomendasi	Belum sesuai dengan rekomendasi dalam proses tindak lanjut	Belum ditindaklanjuti
		Jlh	Jlh	Jlh	Jlh	Jlh
Jawa Barat	s.d. Semester I TA 2009	2.872	4.626	2.301	607	**1.718**
	Pemantauan s.d. Semester II TA 2009	2.874	4.626	2.826	919	**881**
	Semester II TA 2009	434	830	203	65	**562**
	Jumlah s.d. semester II TA 2009	3.308	5.456	3.029	984	**1.443**

Sumber; IHPS BPK RI semester II TA 2009

Dari tabel rekapitulasi hasil pemantauan tindak lanjut di atas masih ada temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan yang belum ditindaklanjuti, hal ini menunjukkan komitmen Kepala Daerah belum sepenuhnya dilaksanakan untuk segera menyelesaikan rekomendasi yang disarankan BPK RI dalam rangka meningkatkan kualitas penyajian laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan

Pemerintah, baik pusat maupun daerah, harus dapat menjadi subyek pemberi informasi dalam rangka pemenuhan hak-hak publik yaitu hak untuk tahu hak untuk diberi informasi, dan hak untuk didengar aspirasinya.

Governmental Accounting Standards Board (GASB) dalam *Concepts Statement No. 1* tentang *Objectives of Financial Reporting* menyatakan bahwa akuntabilitas merupakan dasar pelaporan keuangan di pemerintahan yang didasari oleh adanya hak masyarakat untuk mengetahui dan menerima penjelasan atas pengumpulan sumber daya dan penggunaannya. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas memungkinkan masyarakat untuk menilai pertanggung jawaban pemerintah atas semua aktivitas yang dilakukan. *Concepts Statement No.1* menekankan pula bahwa laporan keuangan pemerintah harus dapat membantu pemakai dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial, dan politik dengan membandingkan kinerja keuangan aktual dengan yang dianggarkan, menilai kondisi keuangan dan hasil-hasil operasi, membantu menentukan tingkat kepatuhan terhadap peraturan perundangan yang terkait dengan masalah keuangan dan ketentuan lainnya, serta membantu dalam mengevaluasi tingkat efisiensi dan efektivitas.

Fenomena yang juga penulis temukan berkaitan Standar Akuntansi Pemerintah yang bersumber dari BPKP LHE yaitu Pemenuhan evaluasi kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja belum dilakukan Belum terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja. Tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan dan pelaporan keuangan di pemerintah.Kurangnya pemahaman tentang SAP, Kurangnya tenaga akuntan. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja, mengukur keberhasilan unit kinerja, Kinerja transparansi dan kinerja bidang ketenagakerjaan

sangat kurang memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK, LAKIP, dan kebijakan-kebijakan belum di akses melalui website.

Dari pemaparan diatas penulis simpulkan bahwa tidak terdapat pedoman pengumpulan data kinerja belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama tidak ada) dan menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi.

Tujuan adanya Standar Akuntansi Pemerintah terhadap laporan keuangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas dari laporan keuangan itu sendiri. Melalui keputusan – keputusan politik dirinci dan didefinisikan guna menciptakan kepastian hukum, cara dan alat mencapainya diatur lebih lanjut dalam UUD, aturan – aturan penyelenggaraan dan perintah – perintah pelaksanaanya secara hierarkis sampai pada tingkat operasional di lapangan. Pertanggungjawabanya pun bertingkat pula. Dengan demikian, menurut Taliziduhu Ndraha tolak ukur akuntabilitas adalah efektivitas dan efisiensi.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tersebut, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). SAP merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Dengan demikian, SAP merupakan persyaratan yang

mempunyai kekuatan hukum dalam upaya meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah di Indonesia.

Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa Kepala Daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Kepala Daerah dipercayakan untuk mengelola sumber-sumber daya publik dan yang bersangkutan dengannya untuk dapat menjawab hal-hal yang menyangkut pertanggungjawabannya. Kepala Daerah melaksanakan pertanggungjawaban keuangan yang berhubungan dengan integritas keuangan, pengungkapan dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang tercermin di dalam Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang akan dipertanggungjawabkan pada DPRD setahun sekali atau diakhir masa jabatannya.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian sebagai berikut :**"PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DAN IMPLIKASINYA PADA AKUNTABILITAS"**

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang diatas, maka peneliti mengidentifiksaikan masalah sebagai berikut :

1. Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja belum dilakukan
2. Belum terdapat penilaian atas akuntabilitas kinerja unit kerja
3. Tidak memadainya SDM yang menangani pengelolaan keuangan di pemerintah.
4. Tidak memadainya SDM yang menangani pelaporan keuangan di pemerintah.
5. Kurangnya pemahaman tentang SAP
6. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan,
7. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja,
8. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti untuk mengukur keberhasilan unit kinerja
9. Kinerja transparansi dan kinerja bidang ketenagakerjaan sangat kurang memenuhi kriteria yaitu RPJMD/Renstra, RKPD/RKT, PK, LAKIP, dan kebijakan-kebijakan belum di akses melalui website
10. Kurangnya tenaga akuntan.
11. Kinerja pencatatan keuangan sangat kurang memenuhi kriteria yaitu ditunjukan dengan hasil pemeriksaan BPK RI memperoleh

"*disclaimer*" evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD sangat kurang memenuhi kriteria

12. Kualitas pengukuran kinerja pemerintah kota bandung sangat kurang memenuhi kriteria yaitu indikator kinerja sasaran belum dapat diukur secara obyektif, belum menggambarkan hasil, tidak relevan dengan sasaran yang akan diukur
13. Kualitas Laporan Keuangan yang sangat kurang memenuhi kriteria karena tidak menyajikan sebagian informasi mengenai pencapaian IKU (indikator kinerja utama), menyajikan sebagian informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan, kemajuan pencapain target jangka menengah.
14. Kualitas pengukuran kinerja belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indikator kinerja utama)
15. Perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun dalam LAKIP belum dapat diandalkan dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan yang lain yang diperlukan dan informasi kinerja
16. Informasi yang disajikan pun belum digunakan untuk peningkatan kinerja evaluasi atas pemanfaatan LAKIP SKPD yang sangat kurang memenuhi kriteria
17. Kualitas pengukuran kinerja belum cukup untuk mengukur sasarannya, target, kinerja jangka menengah

18. Belum diukur realisasinya dan pengumpulan data kinerja belum dapat diandalkan, dan tidak adanya pengukuran atas IKU (indicator kinerja utama tidak ada)
19. Menguatnya tuntutan akuntabilitas atas lembaga-lembaga publik di pusat dan informasi yang disajikan belum digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi
20. Sangat kurang memenuhi kriteria yaitu belum menetapkan indikator kinerja utama (IKU) baik pemerintah daerah maupun SKPDnya, sebgaimana dipersyaratkan oleh peraturan menteri Negara pendayagunaan aparatur Negara nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang pedoman umum penetapn indicator kinerja utama dilingkungan instansi pemerintah, dan tidak terdapat pedoman pengumpulan data kinerja

1.2.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kota Bandung
2. Bagaimana Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung
3. Bagaimana Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung
4. Seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, penelitian ini dimaksud untuk mendapatkan bukti-bukti empiris dilapangan mengenai Pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Sedangkan tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah untuk mempelajari dan mengkaji :

1. Untuk mengetahui Standar Akuntansi Pemerintahan pada Dinas Kota Bandung
2. Untuk mengetahui Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada Dinas Kota Bandung.
3. Untuk mengetahui Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung
4. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung secara parsial dan simultan.

1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan sebagai berikut :

1.4.1 Kegunaan Praktis

1. Sebagai tambahan informasi mengenai Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.
2. Dalam hal pengembangan ilmu, penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengayaan atas teori-teori yang telah ada
3. Bagi dunia pendidikan, diharapkan dapat menjadi acuan dan sumbangan pemikiran pengembangan pendidikan akuntansi dimasa yang akan datang.

1.4.2 Kegunaan Akademis

1. Bagi Dinas Kota Bandung, penelitian ini dapat menjadi tambahan literatur yang dapat menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, untuk menganalisis Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung.
2. Bagi peneliti sendiri diharapkan menjadi sarana untuk menambah pengetahuan tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Kota Bandung. Kedepannya diharapkan menjadi acuan bagi peneliti berikutnya, dalam rangka pengembangan ilmu mengenai topik ini

3. Bagi peneliti selanjutnya, Sebagai bahan referensi bagi peneitian selanjutnya yang tertarik melakukan penelitian yang sama dan juga dapat dijadikan sebagai bahan tambahan pertimbangan dan pemikiran dalam penelitian lebih lanjut dalam bidang yang sama, yaitu Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas
4. Bagi divisi yang terkait dengan penelitian ini dapat memberikan pandangan bagi instansi tentang Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Implikasinya pada Akuntabilitas pada Dinas Pemerintah Kota Bandung.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

1.5.1 Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis berencana melaksanakan penelitian pada Dinas Kota Bandung dan yang Menjadi responden yaitu Auditor Inspektorat Kota Bandung yang berlokasi di Jl. Terra No 220 Bandung.

1.5.2 Waktu Penelitian

Adapun waktu pelaksanaan penelitian adalah dimulai pada Maret 2011 sampai dengan September 2011.

Tabel 1.4
Waktu Penelitian

Tahap		Prosedur	Bulan						
			Mar-11	Apr-11	May-11	Jun-11	Jul-11	Aug-11	Sep-11
I		Tahap Persiapan							
	1	Penyusunan Bab 1,2,3							
	2	Bimbingan dengan dosen pembimbing							
	3	Revisi UP							
	4	ACC UP							
	5	persiapan seminar UP							
II		Tahap Pelaksanaan							
	1	pangambilan data dan pengolahan data							
	2	Bimbingan dengan perusahaan dan dosen pembimbing							
	3	Penyusunan Draft Skripsi							
III		Tahap Pelaporan							
	1	Penyusunan Bab 1,2,3,4,5							
	2	Bimbingan dengan dosen pembimbing							
	3	Revisi 1,2,3,4,5							
	4	ACC Skripsi							
	5	persiapan Sidang Skripsi							
IV		Tahap Akhir							
	1	Penyerahan Laporan Skripsi							
	2	Wisuda							